

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting keberadaannya dalam usahatani. Keterbatasan modal masih menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh rumah tangga petani dan kebutuhan modal usahatani akan semakin meningkat seiring meningkatnya harga input seperti benih, pupuk, obat-obatan dan upah tenaga kerja. Sumber permodalan usahatani dapat berasal dari dalam (modal sendiri) dan dari luar (pinjaman/kredit). Kredit sebagai modal usaha mencerminkan bahwa secara tidak langsung kredit terpaut dalam kegiatan produksi dimana kredit berperan dalam pengadaan faktor-faktor produksi (Asih 2008).

Beberapa hasil penelitian yaitu Atieno (2001); Syukur,dkk (2003); Mohamed (2003); Bakhtiari (2006), menunjukkan bahwa di negara berkembang terdapat dua jenis pasar kredit atau pasar pembiayaan yaitu pasar pembiayaan formal dan pasar pembiayaan informal. Bagi rumah tangga petani, kedua pasar ini merupakan sumber pembiayaan untuk memenuhi kekurangan modal usaha tani maupun untuk kebutuhan konsumsi. Jadi, kredit memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani (Rosmiati, 2012)

Menurut Mosher (1987), kredit merupakan salah satu faktor pelancar pembangunan pertanian. Untuk meningkatkan hasil produksi, petani membutuhkan modal yang besar supaya dapat menggunakan teknologi usahatani secara optimal. Namun adopsi teknologi tersebut pada umumnya relatif mahal dan petani kecil tidak mampu untuk membiayai teknologi tersebut, akibatnya pemanfaatan teknologi sangat rendah. Oleh sebab itu, dengan pemberian kredit pedesaan diharapkan akan mempercepat produksi pertanian dan produktivitasnya dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani (Sjah dan Zubair, 2008).

Menurut Sanim (1998), upaya pemberian bantuan modal oleh pemerintah dengan meningkatkan penggunaan faktor produksi memang tepat untuk meningkatkan pendapatan petani. Menurut Sjah dan Zubair (2008), ketersediaan

kredit memberi kesempatan bagi petani untuk membeli input atau modal lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan di masa datang. Hal ini sejalan dengan penelitian Asih (2008) menyatakan bahwa kredit yang diberikan kepada nelayan memberikan dampak positif, dimana kredit mampu meningkatkan produksi tangkapan nelayan dan peningkatan pendapatan nelayan. Harahap (2010) juga menyatakan bahwa pemberian kredit ketahanan pangan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani dan memberikan manfaat bagi petani untuk tidak lagi terlibat dalam sistem ijon dalam penyediaan modal saprodi.

Tujuan kredit pertanian, khususnya kredit program adalah untuk melindungi golongan ekonomi lemah. Kredit program bertujuan selain meningkatkan produksi juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan (Azhari, 1994). Selanjutnya dikemukakan oleh Nelson (1971) dalam Taylor *et al.*, (1986) bahwa kredit program dapat mengatasi hambatan teknologi dan mempunyai dampak terhadap upaya pembentukan modal (*capital formation*) dan pendapatan.

Salah satu upaya dari Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan sektor adalah Program Bantuan Langsung Masyarakat-Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP). BLM-PUAP diberikan berupa pemberian bantuan modal usaha untuk menumbuhkembangkan usaha agribisnis yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani (pemilik atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani.

Rosmiati (2012) menyatakan bahwa rumahtangga petani pada umumnya mengakses kepada lembaga lembaga kredit informal (83.87%) dan sisanya (16.13%) mengakses kredit formal seperti BRI, koperasi, BPR dan pegadaian. Sumber kredit informal yang paling banyak diakses petani adalah pedagang input (25.81%), tengkulak (19.35%), kelompok tani/gabungan kelompok tani (19.35%), tetangga (5.81%) dan badan keuangan masyarakat (5.16%). Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa BLM-PUAP merupakan bantuan modal yang berasal dari program pemerintah yang paling banyak diakses oleh petani dan disalurkan langsung melalui gabungan kelompok tani (gapoktan).

Dalam hasil penelitian Erna, dkk (2012) menyatakan bahwa ada pengaruh positif pemberian dana PUAP terhadap pendapatan penerima PUAP. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dikemukakan oleh Mariyah (2009) dan Hastuti (2008) bahwa bantuan dana akan berpengaruh positif dan nyata terhadap peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan petani. Dengan memperoleh dana, maka seseorang akan bergairah untuk memperbesar dan memperluas usahanya dan pemberian dana akan menambah modal kerja.

Akbar (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendapatan petani penerima PUAP lebih tinggi dibandingkan petani non PUAP walaupun dengan selisih pendapatan yang tidak jauh berbeda, namun secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap luas lahan, jenis dan jumlah benih, penggunaan pupuk, penggunaan tenaga kerja dan produksi yang diperoleh antara petani penerima PUAP dengan petani non PUAP. Sejalan dengan itu, Anggriani (2012) dalam hasil penelitiannya juga menyatakan bahwa berdasarkan uji beda rata-rata tidak terdapat perbedaan yang nyata antara pendapatan kelompok anggota PUAP dengan kelompok non anggota PUAP.

Meningkatnya kredit dan bantuan modal mendorong meningkatnya penggunaan input usahatani. Kenaikan pemberian kredit akan diikuti kenaikan produksi pertanian dan meningkatkan pendapatan (Derosari, 2014). Nuryartono, dkk (2005) menyatakan bahwa alokasi kredit untuk kegiatan produksi pertanian ditujukan untuk membeli input seperti benih, pupuk, pestisida dan obat-obatan lainnya, membayar upah tenaga kerja, menyewa traktor, membeli kapital dan material lainnya, namun tidak semua petani menggunakan kredit tersebut untuk membeli input produksi.

Berdasarkan uraian diatas, perlu dianalisis bagaimana pengaruh pemberian dana BLM-PUAP terhadap petani baik produksi dan pendapatannya. Adanya sumber kredit, diharapkan petani dapat mengalokasikannya untuk kegiatan usahatannya melalui peningkatan penggunaan input produksi. Dengan adanya peningkatan penggunaan input, berarti mampu meningkatkan produksi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani.

B. Perumusan Masalah

Kota Padang adalah salah satu penerima BLM-PUAP yang digulirkan sejak tahun 2009. Produksi pertanian di Kota Padang didominasi oleh tanaman padi sawah (Lampiran 1). Penyaluran dana BLM-PUAP paling besar dialokasikan untuk usaha tanaman pangan yaitu sebesar Rp 5.07 milyar dengan jenis tanaman pangan yang paling banyak diusahakan adalah padi sawah (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang, 2013).

Kecamatan Kuranji merupakan daerah penghasil padi sawah terbesar yaitu sebesar 32.041 ton dengan luas 5826 hektar (Lampiran 2). Berdasarkan data BPS Kota Padang tahun 2014, produktivitas tanaman padi sawah di Kecamatan Kuranji adalah 5.50 ton per hektar. Hasil ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan produktivitas mencapai 7.08 ton per hektar. Ini menunjukkan bahwa produktivitas usahatani padi sawah di Kecamatan Kuranji masih perlu ditingkatkan dalam upaya peningkatan produksi dan pendapatan petani.

Meningkatnya perkembangan area pemukiman di Kecamatan Kuranji, akan berdampak terhadap keberadaan lahan pertanian. Meskipun begitu, upaya peningkatan produksi padi sawah masih dapat dilakukan dengan peningkatan produktivitas seperti dengan intensifikasi pertanian. Upaya peningkatan produksi ini akan membutuhkan lebih banyak modal dan tenaga kerja untuk mengadopsi teknologi baru. Suratiyah (2009) menyatakan bahwa semakin banyak modal dan tenaga kerja yang dicurahkan pada tanah maka semakin intensif pula produksi.

Permasalahan produktivitas tanaman padi sawah yang rendah diduga berkaitan erat dengan tingkat penggunaan input yang masih rendah. Penggunaan rata-rata input yang digunakan petani berupa pupuk seperti Urea, SP-36 dan KCl adalah 80 kg, 50 kg, dan 18.5 kg per hektar. Kondisi ini masih lebih rendah dari pada dosis pupuk yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian, yakni Urea 150–200 kg, SP-36 90-150 kg, dan KCl 75-100 kg per hektar (Maryah, 2008).

Menurut penelitian Puslitbangwil Unmul (2002), permodalan menjadi salah satu faktor pembatas dalam pengembangan padi. Menurut Rosmiati (2012) menyatakan bahwa keberadaan kredit sangat penting dalam pengembangan produksi padi terutama petani yang berlahan sempit.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat (2014), total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah adalah sebesar Rp 10,08 juta. Biaya produksi usaha tanaman padi sawah terbesar adalah upah pekerja yaitu mencapai 55.64 persen dari total biaya atau sebesar Rp 5.61 juta. Selain itu, komponen biaya produksi yang juga relatif besar adalah pengeluaran untuk sewa lahan dan pupuk, yaitu masing masing sebesar 24.85 persen (Rp 2.5 juta) dan 9.80 persen (Rp 988.23 ribu) dari total biaya.

Berdasarkan observasi awal, dalam pembiayaan usahatani padi petani disamping menggunakan modal sendiri juga melakukan pinjaman kredit disekitar wilayah tempat tinggal mereka, salah satunya adalah BLM-PUAP. Pada Program BLM-PUAP, petani menerima bantuan modal berupa uang tunai. Jumlah pinjaman bervariasi disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki petani. Kisaran pinjaman dana BLM-PUAP adalah Rp 1 juta sampai Rp 2 juta untuk setiap pinjaman, namun jika pengembalian pinjaman lancar, maka pinjaman berikutnya dapat dinaikkan hingga Rp 4 juta. Besar bunga pinjaman yang ditetapkan berkisar 0,5 – 1.5 persen perbulannya dengan waktu pengembalian maksimal 10 bulan.

Nuryartno, dkk (2005) menyatakan bahwa alokasi kredit untuk kegiatan produksi pertanian ditujukan untuk membeli input seperti benih, pupuk, pestisida dan obat-obatan lainnya, membayar upah tenaga kerja, menyewa traktor, membeli kapital dan material lainnya. Menurut Olagunju (2007), tidak semua petani menggunakan kredit tersebut untuk membeli input produksi. Petani berlahan sempit tidak membeli input atau teknologi lainnya terutama misalnya untuk menyewa traktor. Pada rumahtangga tani miskin, kredit produksi dengan tujuan untuk kegiatan produksi juga berpeluang dimanfaatkan untuk kegiatan konsumsi (Derosari, 2014).

Meningkatnya kredit dan bantuan modal mendorong meningkatnya penggunaan input usahatani. Kenaikan pemberian kredit akan diikuti kenaikan produksi pertanian dan meningkatkan pendapatan. (Derosari, 2014). Hal ini sejalan dengan Mahendri (2009) yang menyatakan bahwa jumlah kredit yang diterima akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan adanya sumber permodalan yang berasal dari dana BLM-PUAP yang bertujuan untuk kegiatan produksi, diharapkan

petani dapat mengalokasikannya pada kegiatan usahatani, dimana mereka dapat meningkatkan penggunaan input produksi, sehingga produksi meningkat dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani.

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan penelitian yang timbul, yaitu :

1. Bagaimana hubungan pemanfaatan BLM-PUAP terhadap penggunaan input pada usaha tani padi sawah di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh dari program BLM-PUAP terhadap produksi dan pendapatan petani padi sawah di Kota Padang?

Sehubungan dengan itu, maka peneliti memberi judul penelitian ini dengan “Analisis Pengaruh Program Bantuan Langsung Masyarakat-Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) terhadap Produksi dan Pendapatan Petani di Kota Padang”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis hubungan pemanfaatan BLM-PUAP terhadap penggunaan input pada usahatani padi sawah di Kota Padang
2. Menganalisis pengaruh BLM-PUAP terhadap produksi dan pendapatan petani di Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang pembiayaan pertanian dan dapat menjadi sumber literatur bagi penelitian selanjutnya terkait masalah pembiayaan usahatani, menjadi bahan pertimbangan bagi petani dalam pembiayaan usahatani serta menjadi bahan masukan bagi para stakeholder untuk perbaikan Program PUAP di masa datang.